

KONTRAK POLITIK 1940 DI YOGYAKARTA TAHUN 1939-1942

THE 1940 POLITICAL CONTRACT IN YOGYAKARTA 1939-1942

Oleh: Muhammad Farish Rasyadan dan Dr. Dyah Kumalasari, M. Pd.
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu, Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
muhammadfarish99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi Yogyakarta masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (2) proses dan isi dari Kontrak Politik 1940, (3) dampak dari Kontrak Politik 1940 di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, (1) pemilihan topik sejarah, (2) pengumpulan sumber, (3) kritik sumber, (4) interpretasi, (5) penulisan sejarah. Hasil penelitian: (1) Kondisi Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dapat dikatakan maju dengan adanya beberapa organisasi yang lahir dan berkembang di Yogyakarta. Sistem birokrasi yang berlaku dari tahun 1918 masih berlaku hingga akhir jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. (2) Proses Kontrak Politik 1940 berlangsung selama 4 bulan. Kontrak Politik 1940 terdiri dari 59 pasal. Isi dari Kontrak Politik 1940 mengatur sistem birokrasi di Yogyakarta terutama dalam hal kedudukan Sultan, Kesultanan dan Papatih Dalem. (3) Dampak dari Kontrak Politik 1940 yang pertama adalah penobatan Dorodjatun menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kedua, perubahan birokrasi yang seolah-olah terdapat dua birokrasi di kraton dan nagari.

Kata kunci: *kontrak politik, Kontrak Politik 1940, Sultan, Yogyakarta*

Abstract

This study aimed to investigate: (1) the conditions of Yogyakarta during the reign of Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, (2) the process and contents of the 1940 Political Contract, and (3) the impacts of the 1940 Political Contract in Yogyakarta. This study used Kuntowijoyo's historical research method, (1) historical topic selection, (2) collection of sources, (3) source criticisms, (4) interpretation, and (5) history writing. The results of the study were as follows. (1) The conditions of Yogyakarta during the reign of Sri Sultan Hamengkubuwono VIII had been relatively progressive with the existence of some organizations which were established and developed in Yogyakarta. The bureaucratic system established from 1918 was still applied until the end of the reign of Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. (2) The 1940 Political Contract process lasted for 4 months. The 1940 Political Contract of 1940 consisted of 59 articles. The contents of the 1940 Political Contract regulated the bureaucratic system in Yogyakarta especially in terms of the positions of Sultan, Kasultanan (sultanate) and Papatih Dalem. (3) The first impact of the 1940 Political Contract was the coronation of Dorodjatun as Sri Sultan Hamengkubuwono IX. The second was a bureaucratic change that seemed to be two bureaucracies in the palace and nagari (government).

Keywords: *political contract, 1940 Political Contract, Sultan, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu pilar dari rakyat Yogyakarta. Pergantian kekuasaan terjadi seiring perkembangan waktu yang ada. Kesultanan Yogyakarta turut andil dalam perjuangan Indonesia melawan kolonial Belanda. Proses transisi ini terjadi melalui berbagai tahapan dan peristiwa politik dengan pihak Belanda. Sultan pada masa penjajahan Belanda melakukan beberapa kontrak politik dengan Hindia Belanda. Kontrak politik diperlukan untuk melindungi rakyat Yogyakarta dan mensejahterakannya. Kontrak politik dilakukan dalam upaya tetap adanya wewenang dan kewajiban dari pemerintah dan Sultan. Kontrak politik sendiri sebagai dasar bagi perundang-undangan pemerintah dan peradilan di daerah swapraja, jadi bisa disebut sebagai konstitusi.¹

Kontrak Politik 1940 sendiri merupakan kontrak politik terakhir antara Sultan dengan Belanda sebelum digantikan oleh Jepang yang masuk Indonesia. Pemerintah Belanda begitu menginginkan kontrak politik dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain itu, menarik

dipelajari proses kontrak politik yang memakan waktu hingga empat bulan.

Proses transisi yang diketahui langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII ke Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebenarnya Dr. Lucien Adam pernah memimpin Yogyakarta selama empat bulan untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Hingga tahun 1942 pun struktur birokrasi Kesultanan Yogyakarta masih ada pemerintahan Hindia Belanda yang membatasi kekuasaan Sri Sultan Hamengkubowono IX secara legal terhadap kabupaten-kabupaten, sehingga wilayah Yogyakarta dapat dieksploitasi Belanda.²

Batasan periodisasi dari tahun 1939-1942 karena pada tahun 1939 merupakan wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang sebelumnya memilih G.R.M Dorodjatun sebagai penerus beliau yang masih di Leiden. Empat bulan yang dilalui untuk kontrak politik sangat penuh dengan perdebatan panjang. Dr. Lucien Adam yang ditunjuk Belanda untuk melakukan kontrak politik tentu bukanlah orang sembarangan. Dr. Lucien Adam merupakan ahli kebudayaan Jawa yang pandai melakukan lobi-lobi dan juga

¹ Soedarisman Poerwokoesoemo. *Kasultanan Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1985), hlm. 3

² Soewarno, P.J. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. (Yogyakarta: Kanisius. 1994), hlm. 73.

selaku Gubernur Yogyakarta masa tersebut. Tahun 1942 merupakan tahun terakhir Belanda berada di Indonesia sebelum masuknya pemerintahan kolonial Jepang. Setelah Kontrak politik 1940 dampaknya dirasakan sampai dengan tahun 1942. Setelah tahun 1942 kebijakan telah berganti karena masuknya pemerintahan kolonial Jepang yang tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Kontrak Politik 1940 yang mengangkat G.R.M Dorodjatun sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Penelitian ini memiliki kajian tentang Kontrak Politik 1940 yang tentu di dalamnya terkandung beberapa hal seperti proses terjadinya, dampak yang ditimbulkan dari kontrak politik tersebut ketika Yogyakarta masih dalam masa adanya Hindia Belanda. Oleh karena itu, kondisi di Yogyakarta pada tahun 1939-1942 perlu diketahui dan diamati. Buku *Perubahan Sosial di Yogyakarta* karya Selo Soemardjan tahun 2009 oleh Komunitas Bambu menjelaskan keadaan masyarakat, administrasi pemerintahan, pendidikan di Yogyakarta. Untuk penelitian, di buku ini terdapat perubahan-perubahan dalam pemerintahan Yogyakarta di bawah rezim Belanda dan setelahnya.

Kajian Pustaka

Kontrak Politik 1940 oleh peneliti dalam kajian isi menggunakan sumber

buku karya Soedarisman Poerwokoesoemo berjudul *Kasultanan Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940)* tahun 1985 oleh Gadjah Mada University Press. Buku ini menjelaskan kontrak politik Yogyakarta dan Hindia Belanda dari tahun 1877 sampai 1940. Peneliti dalam hal ini tentu mengambil penjelasan tentang Kontrak Politik 1940 dan sedikit membandingkan dengan kontrak politik sebelumnya.

Setelah proses terjadinya suatu kontrak politik tentu akan menimbulkan dampak terhadap kondisi sekitarnya. Peneliti menggunakan buku karya P.J Suwarno berjudul *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974* tahun 1994 oleh Kanisius untuk mengetahui kondisi Yogyakarta pasca ditandatanganinya Kontrak Politik 1940. Buku ini terdapat kondisi birokrasi politik dari pasca kontrak politik hingga Belanda keluar sebelum Jepang masuk ke Indonesia yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam penulisan ini digunakan tahapan-tahapan penulisan menurut Kuntowijyo, yang mengemukakan penelitian

mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi dan penulisan atau historiografi.³

Pemilihan topik dalam hal ini tentu memiliki daerah dan wilayah yang begitu luas. Peneliti harus menentukan topik dan batasan agar pembahasan tidak terlalu luas dan bisa terfokus dalam suatu permasalahan. Peneliti dalam pemilihan topik lebih mendekati diri terhadap suatu kontrak politik yang dilakukan oleh Hindia Belanda dan G.R.M Dorodjatun. Hal ini dipilih karena adanya beberapa sumber yang tersedia. Pemilihan topik ini perlu untuk mengetahui batasan terhadap permasalahan, baik dalam ruang maupun waktu. Peneliti membatasi rentang waktu dari 1939-1942. Peneliti juga mempunyai batasan ruang yaitu wilayah Yogyakarta.

Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak masa lalu dan mencari sumber-sumber. Heuristik bertujuan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya yang relevan dengan penelitian. Sumber yang digunakan penulis dalam "Pengaruh Kontrak Politik 1940 di Yogyakarta 1939-1942" diperoleh dari berbagai perpustakaan dan arsip. Penulis telah berkunjung ke Laboratorium Sejarah

FIS UNY, Perpustakaan FIS UNY, Perpustakaan UPT UNY, Perpustakaan Kolese St. Ignatius, Perpustakaan Kraton Yogyakarta Widya Budaya, BPAD DIY, dan *Jogja Library Centre*. Adapun sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer penelitian ini dari *Staatsblaad* yang merupakan sumber asli Kontrak Politik 1940 dengan Bahasa Belanda. *Staatsblaad 1941, No. 47* merupakan sumber asli yang dapat digunakan sebagai sumber primer untuk mengetahui isi dari Kontrak Politik 1940. Sumber-sumber sekunder yang digunakan penulis diantaranya buku Selo Soemardjan berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*., buku PJ Soewarno berjudul *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, dan buku Soedarisman Poerwokoesoemo berjudul *Kasultanan Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940)*.

Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi atau kritik sumber. Adanya cap dari Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sesuai membuat arsip ini merupakan arsip

³ Kuntowijoyo., *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013), hlm. 69.

asli. Selain itu, peneliti mendapatkan *Staatsblaad* ini dalam koleksi langka di perpustakaan milik pemerintah yang dijamin keasliannya. Penulis juga membandingkan beberapa sumber baik yang primer maupun sekunder dan ditemukan saling keterkaitan dan kesamaan. Salah satu contohnya yaitu proses perundingan Kontrak Politik 1940 antara Dr. Lucien Adam dan Dorodjatun yang kurang lebih sama antara sumber satu dengan yang lain, begitu juga dengan isi dari Kontrak Politik 1940.

Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubung antara fakta yang berhasil dibangun. Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Kontrak Politik 1940. Kontrak Politik 1940 itu sendiri termuat dalam arsip yang digunakan peneliti. Selain dari sumber arsip tersebut, peneliti menggunakan sumber-sumber sekunder untuk melengkapi pernyataan. Tahap terakhir adalah historiografi yang merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Historiografi juga dapat disebut sebagai penulisan sejarah. Bentuk penyajian hasil penelitian ini adalah ilmiah, sesuai dengan tujuannya.

PEMBAHASAN

Yogyakarta Pada Masa Pemerintahan Hamengkubuwono VIII

Posisi organisasi pemerintahan atau sistem birokrasi di Yogyakarta selama penjajahan Belanda sesudah tahun 1918 dan berlaku sampai akhir masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII masih sama yaitu kedudukan Sri Sultan, Gubernur Belanda, dan Pakualaman sejajar. Ketiganya bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di atasnya. Organisasi alat-alat pemerintahan kraton Yogyakarta terdiri atas abdi dalem, prajurit lurah pangeran, putra mahkota, patih, dan penghulu. Masa Hamengkubuwono VIII mempunyai delapan kesatuan prajuriti yaitu Wirabraja, Demang, Patangpuluh, Jagakarya, Prawiratama, Nyutra merah dan hitam, Ketanggung, Mantri Jeron dan Langenastra. Tiap-tiap prajurit mempunyai satu kampung dan mempunyai bendera sendiri. Masalah pendidikan rakyat masih terbatas. Hanya lurah yang mampu melaksanakan anaknya ke HIS yang berbahasa Belanda⁴.

Beberapa organisasi dan kegiatan berorganisasi juga berdiri dan terlaksana pada masa Hamengkubuwono VIII seperti Pakempalan Politik Katolik Jawi 1923, ibu-

⁴ Sutrisno Kutoyo dkk.. *Sejarah Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta: Depdikbud. 1997), hlm. 169.

ibu menyelenggarakan Kongres Perempuan 1929. Suwardi Suryaningrat mendirikan perguruan nasional Taman Siswa 1922. Perhatian Sri Sultan Hamengkubuwono VIII terhadap rumah sakit juga besar, seperti penyerahan ambulan ke Rumah Sakit Panti Rapih tahun 1939 sebelum beliau mangkat.⁵

Permasalahan yang muncul dalam bidang politik tentu adalah Papatih Dalem yang sudah sejak lama selalu menjadi perbincangan serius dalam kontrak politik. Papatih Dalem bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari Kasultanan. Ia diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII atas persetujuan Gubernur Jenderal. Ia bertanggung jawab kepada Sultan dan Gubernur. Ia bersumpah setia kepada Sultan dan Gubernur. Ia pun mendapat gaji dari Kasultanan dan dari Gubernur Belanda. Namun, dalam prakteknya, Belanda memakai Papatih Dalem itu untuk mengendalikan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Status dan peran ganda Papatih Dalem meringkali memicu konflik antara Sultan dan Belanda. Belanda sering mengadu domba Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Papatih Dalem tersebut. Sementara itu, Papatih Dalem condong memihak ke Belanda. Karena itu

sultan pernah mengangkat papatih dalam tanpa persetujuan Belanda. Bahkan pernah ada Papatih Dalem yang dibunuh karena menjadi antek penjajah.⁶

Perbedaan mendasar dari kontrak politik tahun 1921 masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII ialah Sultan dinyatakan lebih tegas dan jelas dibanding kontrak tahun 1877 masa Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Posisi Sultan sebagai pihak yang harus memperhatikan kepentingan rakyat lebih ditandaskan dan pemisahan kas kraton dan kas kesultanan dilaksanakan demi tujuan tersebut. Sultan diberi tugas lebih aktif, sebagai Kepala Daerah kesultanan beliau harus benar-benar ikut serta dalam pemerintahannya.

Dampak yang ditimbulkan dari kontrak politik 1921 tidak selamanya buruk, meskipun dari isi kontrak politik itu sendiri melemahkan kesultanan. Akan tetapi terdapat dampak positif dari hal tersebut di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Beberapa hal disampaikan ialah kegiatan politik masa usai kontrak politik, munculnya organisasi-organisasi lokal dan juga berkembangnya seni dan budaya masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.

⁵ Soedarisman Poerwokoesoemo. *Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. (Yogyakarta: Kanisius. 1994), hlm. 22

⁶ Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo.. *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*. (Yogyakarta: Penerbit Galangpress. 2011), hlm 33.

Proses Kontrak Politik 1940

Berawal dari pecahnya Perang Dunia II yang menyebabkan suasana menjadi memburuk di Eropa, oleh karena itu pada bulan Oktober 1939 Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang kondisi kesehatannya menurun memerintahkan Dorodjatun yang bersekolah di Leiden, Belanda segera pulang. Selanjutnya mereka menginap di Hotel Des Indes dimana di hotel tersebut dilangsungkan beberapa acara resmi bersama pemerintahan kolonial. Meskipun tidak ada pembicaraan penting antara beliau dan Dorodjatun namun ada peristiwa penting yaitu penyerahan Keris Pusaka Keraton Kyai Jaka Piturun Sepeninggal Sri Sultan Hamengkubuwono VIII kekuasaan kraton diambil alih Gubernur Dr. Lucien Adam. Selanjutnya Lucien Adam membentuk panitia untuk mengorganisasi pemerintahan kraton.

Dorodjatun mengadakan perundingan dengan Gubernur Lucien Adam untuk merumuskan Surat Perjanjian yang mendasari birokrasi pemerintahan Yogyakarta.⁷ Akhirnya kontrak politik tersebut ditandatangani dengan alasan yaitu dugaan Belanda tidak lama lagi menjajah Indonesia dan bisikan gaib yang diterima

Dorodjatun sesuai kepercayaan tradisional dan percaya mistik untuk mengakhiri perundingan.

Kontrak Politik 1940 disahkan pada tanggal 18 Maret 1940. Kontrak ini berisi 59 pasal dengan beberapa ketentuan. Kontrak politik 1940 dicetak dalam dua versi yaitu Bahasa Belanda dan Bahasa Jawa. Kontrak politik ini ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Gubernur Yogyakarta yaitu Dr. Lucien Adam. Selain mereka berdua kontrak politik ini ditandatangani Danurejo, Pepatih Dalem Yogyakarta. Sebagai saksi juga ditandatangani Ch. W.A. Abbenhuis selaku asisten residen atau Kepala Daerah Yogyakarta dan disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh dan Sekretaris umum J.M. Kiveron pada tanggal 29 April 1940.

Beberapa hal pokok dalam isi Kontrak Politik diantaranya dalam pasal 1 ayat 1 bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian daripada Hindia Belanda yang juga merupakan bagian dari negara Belanda. Maka Sultan dibawah kekuasaan Ratu Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal. Pasal 1 ayat 2 ditegaskan kekuasaan atas daerah

⁷ Julious Pour. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2012), hlm. 142.

Yogyakarta dilakukan oleh Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jendral.⁸

Pasal 13, dalam melakukan kekuasaan itu Sultan dibantu oleh Papatih Dalem yang diangkat serta diberhentikan oleh Gubernur Jenderal setelah berunding dengan Sultan. Papatih Dalem bertanggung jawab kepada gubernur maupun Sultan, untuk itu Papatih Dalem mendapat gaji dari gubernemen dan kasultanan.⁹

Masalah prajurit kraton yang diinginkan Hindia Belanda menjadi satu legion dibawah komando KNIL, tetapi Dorodjatun tidak memiliki wewenang memerintah sedangkan harus menggaji dan melatih. Dorodjatun menginginkan prajurit kraton digaji dan dilatih dibawah komando.

Dampak Kontrak Politik 1940 di Yogyakarta

Dampak dari Kontrak Politik 1940 yang paling terasa dan tentu sebagai awal dari dimulainya pemerintahan baru yaitu sultan yang baru, dengan perdebatan dan perundingan yang ketat tentu saja ialah penobatan sang raja, yaitu penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam pidato saat penobatan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengungkapkan

sikap menyangkut keteguhan tetap sebagai orang Jawa meski telah mengenyam pendidikan barat yang didengar ratusan orang undangan di tempat penobatan, Siti Hinggil Keraton Yogyakarta.¹⁰

Sistem birokrasi pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX setelah kontrak politik seolah-olah terdapat dua birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan Kesultanan berpusat di kraton dan birokrasi pemerintahan Negeri yang dikontrol Gubernur Belanda berpusat di Kapatihan. Kedua birokrasi pemerintahan ini berpuncak pada Sultan yang tinggal di kraton, tetapi sejak terpisahnya negeri dan kraton, Sultan tidak mempunyai kekuasaan lagi dan hanya menjadi simbol saja.¹¹

Pemerintahan Hindia Belanda telah membatasi kekuasaan Sultan secara legal terhadap kabupaten-kabupaten, sehingga secara sistematis wilayah Yogyakarta dapat dieksploitasi Belanda dengan birokrasi yang dimiliki Kasultanan sendiri.¹² Ketika Belanda hendak mengadakan perubahan di Yogyakarta memilih dan memasukkan perubahan itu lewat pegawai-pegawai Belanda yang ditugaskan di Yogyakarta, sedangkan abdidalem tidak dipersiapkan

⁸ Soedarisman Poerwokoesoemo. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1984), hlm. 4

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Julious Pour., *op. cit.*, hlm. 23.

¹¹ Soewarno, P.J., *op. cit.*, hlm. 84.

¹² *Ibid.*, hlm. 73.

memahami perubahan yang dilaksanakan. Jadi mereka hanya menjalankan perintah tanpa mengerti arah tujuan. Sebaliknya Sultan dalam mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta selalu mengawalinya dengan mempersiapkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para abdidalem. Dengan tekun beliau mengadakan komunikasi langsung dengan rakyat desa-desa dan pejabat di daerah-daerah, menerima tokoh masyarakat dan pengurus organisasi masyarakat di kraton, mengadakan perjalanan keliling daerah-daerah luar Yogyakarta untuk studi banding. Dengan demikian birokrat itu memahami perubahan birokrasi pemerintah yang diadakan dan rakyat mendukungnya dengan kesadaran.¹³

Belanda dikejutkan dengan aksi dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang berdiri pada Mei 1939. Federesai baru ini bertujuan mempersatukan partai-partai politik Indonesia. GAPI menuntut diadakannya parlemen penuh di Indonesia. Aksi ini mengkhawatirkan Hindi Belanda dan diberi peringatan oleh Gubernur Jenderal. Keadaan internasional diperkirakan mempengaruhi tuntutan tersebut dari pergerakan dan selain itu ada

beberapa Menteri dari partai sosialis Belanda dalam kabinet.¹⁴

Masa-masa akhir pemerintahan Kolonial Belanda di Yogyakarta juga terpengaruh oleh situasi dunia saat itu. Pada tanggal 10 Mei 1940 tentara Jerman menyerbu Negeri Belanda, empat hari kemudian pemerintah Jepang mengadakan pergerakan pertama terhadap Hindia Belanda. Beberapa upaya dilakukan Belanda agar pengaruh Jepang tidak semakin membesar di Hindia Belanda. Kesultanan Yogyakarta pun juga mendapatkan perintah dari Hindia Belanda melalui beberapa kebijakan.. Pada akhirnya kota Yogyakarta diduduki oleh Jepang pada 5 Maret 1942.¹⁵

KESIMPULAN

Keadaan Yogyakarta masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII tidak lepas dari campur tangan Pemerintahan Kolonial Belanda. Berbagai kontrak politik dilakukan oleh Belanda dari sultan ke sultan yang berkuasa sebelum dan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memimpin. Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, sistem birokrasi yang berlaku selama penjajahan Belanda

¹³ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁴ Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014), hlm. 130.

¹⁵ Ahmad Adaby Darban dkk. *Biografi Pahlawan Nasional: Sultan Hamengkubuwana IX*. (Jakarta: Depdikbud. 1998), hlm. 20.

dari tahun 1918 masih berlaku hingga akhir jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Kedudukan Sri Sultan, Gubernur Belanda, dan Pakualaman dalam posisi yang sejajar. Ketiganya bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di atasnya.

Proses Kontrak Politik 1940 terjadi setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Kesultanan Yogyakarta belum mempunyai pemimpin baru. Dorodjatun sebagai putra mahkota harus terlebih dahulu melakukan kontrak politik dengan Belanda yang diwakilkan Dr. Lucien Adam. Proses perundingan berlangsung selama 4 bulan hingga akhirnya disetujui kedua pihak. Dorodjatun selalu menekankan untuk menghapus dwikesetiaan Papatih Dalem yang tentu tidak disetujui oleh Dr. Lucien Adam. Akhirnya kontrak politik tersebut ditandatangani dengan alasan yaitu dugaan Belanda tidak lama lagi menjajah Indonesia dan bisikan gaib yang diterima Dorodjatun sesuai kepercayaan tradisional dan percaya mistik untuk mengakhiri perundingan.

Dampak dari Kontrak Politik 1940 adalah penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan sedikit perubahan birokrasi karena Belanda yang tidak lama setelah kontrak politik masuklah Jepang ke Yogyakarta. Proses penobatan Sri Sultan berlangsung pada 12

Maret 1940 dengan Dr. Lucien Adam menobatkan Dorodjatun dan ditandatanganinya Kontrak Politik 1940. Perubahan birokrasi yang ditampilkan berjalan seolah-olah terdapat dua birokrasi. Pemerintah Kesultanan berpusat di kraton dan birokrasi pemerintahan Negeri oleh Gubernur Belanda berpusat di Kepatihan. Perubahan birokrasi setelah Kontrak Politik 1940 memang tidak terlalu kelihatan dan hampir sama ketika masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, tetapi ada upaya untuk melepaskan diri dari penjajahan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Staatsblaad 1941 No. 47

Buku

Ahmad Adaby Darban dkk. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional: Sultan Hamengku Buwana IX*. Jakarta: Depdikbud.

Julious Pour dan Nur Adji. 2012. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat: 100 Tahun Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Kompas.

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. 2011. *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. 2014. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Selo Soemardjan. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1985. *Kasultanan Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1994. *Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Kanisius.

Snewarno, P.J. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius.

Sutrisno Kutoyo dkk. 1997. *Sejarah Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.

Dosen pembimbing



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.
NIP. 19770618 200312 2 001

Reviewer



Dr. Aman, M.Pd.
NIP. 19741015 200312 1 001

